

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hofir, Dhimas Wisnu Mahendra, Dwi Ratih Mutiarasari, Edmalia Rohmani, Endang Unandar, Fri Okta Fenni, Gitarani Prastuti, Herry Prpto, I Gusti Agung Yuliari, Indah Fitriana Astuti, Meirna Dianingtyas, Moh Makhfal Nasirudin, Netadea Aprina, Riza Almanfaluthi, Shinta Amalia, Sri Lestari Pujiastuti, Suyani, Tedy Iswahyudi, *Reformasi adalah Keniscayaan, Perubahan adalah Kebutuhan, Cerita di Balik Reformasi Perpajakan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2023
- Black, Henry Campbell, *Black Law's Dictionary*, 6th ed, Minnesota: West Publishing Co, 1990
- Debby Affianti, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Ginting, Miko, *Jaminan Hak Sipil dalam Pemenuhan Layanan Administrasi Kependudukan Selama Pandemi Covid-19*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020
- Iman Akhadi, *Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat*. Jakarta: STIE Trisakti, 2022
- Imron Fauzi, Srikantono, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*, Jember: SUPERIOR “Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial”, 2013
- Joseph M Monteiro, *Hukum Keuangan Negara dan Daerah*, Malang: Setara Press, 2019
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Yogyakarta: Andi, 2018
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 2001

- Sugondo, Sulistyowati S.H., *Pokok-Pokok Pikiran dan Paradigma Baru Catatan Sipil Nasional*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005
- Widya Astuti, S. Pd, M. Pd, Drs. Sugeng Baskoro, M.M, *Modul Pembelajaran Online 6 Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2019

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pekerja Sosial
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perajakan
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- Perpres 40 Tahun 2018 tentang Perbaikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Perpres No 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Keuangan No 112 Tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan No 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK No 112 Tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6 Tahun 2024 tentang penggunaan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak Dengan Format 16 (Enam Belas) Digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha Dalam Layanan Administrasi Perpajakan

C. Jurnal

Adrie, “Peningkatan Kinerja Pelayanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Perspektif Hukum Kepegawaian”, *Jurnal Yustitia* 13, no 2 (2019), <https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i2.394>

Akhadi, Iman, “Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat”, *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesia Tax Review)* 6, no 1, (24 Juni 2022), <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2013.10.009>

Alfiyah, Nur, Sri Wahjuni Latifah, “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 7, no 2 (Oktober 2017), View of PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUNSET POLICY, TAX AMNESTY, DAN SANKSI

PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- Anasiru, Ronawaty. "Kebijakan Publik dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial", *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no 1 (April 2011), <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i1.19>
- Anugrah, M Sahib Saesar, Primandita Fitriandi, "Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan *Theory Planned Behavior*", *Jurnal Info Artha* 6, no 1, (2022), <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Atmadja, Dewa Gede, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kertha Wicaksana* 12 no 2, <https://doi.org/10.22225/kw.12.2.2018.145-155>
- B. Aswandi, and K. Roisah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no 1, (Januari 2019), <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Darmono, Letjen TNI Bambang, "Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia", *Jurnal Ketahanan Nasional* 15, no 1, (April 2010), <https://doi.org/10.22146/jkn.22307>
- Diamendia, Tia, Milla S. Setyowati, "Analisis Kebijakan *Compliance Risk Management* Berbasis *Machine Learning* Pada Direktorat Jenderal Pajak", *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 6, no 3 (30 September 2021), <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.401>
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, Absori. "*Quo Vadis* Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 31, no 3, (Juni 2019), <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Hardianto, Wily Tri, Firman Firdausi, Asih Widi Lestari, "Fungsi e-KTP Untuk Mendukung Pemerintah Daerah Dalam Pendataan dan

- Pelayanan Publik”, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 7, no 2, <https://doi.org/10.30996/jpap.v7i2.5704>
- Hidayat, Aisyah, Asriani Junaid, Nur Wahyuni, and Andi Nurwana. “Optimalisasi Pengelolaan Pajak Sebagai Sarana Kesejahteraan Sosial Di Kota Makassar”, *Center of Economic Students Journal* 4, no 3, (31 Juli 2021) <https://doi.org/10.56750/csej.v4i3.437>
- Hidayat, Aisyah, Asriani Junaid, Nur Wahyuni, and Andi Nurwana. 2021. “Optimalisasi Pengelolaan Pajak Sebagai Sarana Kesejahteraan Sosial Di Kota Makassar”. *Center of Economic Students Journal* 4, no 3, (31 Juli 2021) <https://doi.org/10.56750/csej.v4i3.437>.
- Husna, Nurul, “Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial”, *Jurnal Al-Bayan* 20, no 1, (2014), <https://dx.doi.org/10.22373/albayan.v20i29.114>
- Junaedy, I Kadek Dede, I Nyoman Sugiarta, “Sosialisasi Pentingnya Administrasi Kependudukan dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat di Desa Pauh Puri Kaja Denpasar”, *Jurnal Abdimas Indonesia* 4, no 3 (Juli-September 2024), <https://doi.org/10.53769/jai.v4i3.926>
- Kurniadi, Surya, “Perwujudan Good Governance Pada Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Peduli Lindungi”, *UNES LAW REVIEW* 6, no 2, (22 Desember 2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1438>
- Laili, Amelia Nur, Irawati, “Analisis Implementasi Kebijakan e-Registration Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pademangan Tahun 2021”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no 2 (Maret 2023), <https://doi.org/10.31334/jiap.v3i2.3151.g1502>
- Larosa, Wilan Rias Mei, Atriani Halawa, “Analisis Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak di Sektor Ekonomi Informal”, *JUKONI: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 1, no 1, (Oktober 2024)
- Layliah, Nafisakhatul, “Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara”, *Researchget.net* (October 2019),

https://www.researchgate.net/publication/336848033_WEWENANG_DALAM_HUKUM_ADMINISTRASI_NEGARA

- Libra Robert, Muhammad Fauzan, “Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau”, *Jurnal Esensi Hukum Magister Hukum UPNVJ* 5, no 1, (Juni 2023), <https://doi.org/10.35586/jsh.v5i1.225>
- Lismanto, L, Yos Johan Utama, “Membumikan Instrumen Hukum Adminsitasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no 3, (Agustus 2020), <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>
- Marbun, SF, “Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no 6, (8 Juni 2016) <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art4>
- Maryanto, Budi, “Big Data Dalam Pemanfaatannya dalam Berbagai Sektor”, *Jurnal Media Informasi* 16, no 2 (2017), https://jurnal.likmi.ac.id/Jurnal/7_2017/0717_02_BudiMaryanto.pdf
- Pujiwidodo, Dwiymoko, “Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Indonesia Periode Tahun 2002 Sampai Dengan Tahun 2008”, *Jurnal Perspektif* 7, no 2 (September 2009), <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/345>
- Rioni, Sari Yunita, S.E., M. Si, Ak, CA, Teuku Radhifan Syauqi, S.E., M.Si, CPA. “Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat”, *Jurnal Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi* 1, No 2 (Januari 2020), <https://doi.org/10.22146/jkn.22307>
- Rombot, Berliani, Emma V.T. Senewe, Dicky J Paseki, “Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara Berdasarkan Hukum Internasional”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 12, no 2 (September 2023), <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>

- S, Eben Henry R M, Dian Arsitha W, “Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia”, *Politeknik STIA LAN Jakarta* 8, no 1, (Agustus 2024), Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia | Simanjuntak | Konferensi Nasional Ilmu Administrasi
- Sa’adah Nabitatus, “Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Berdasarkan Keadilan yang Mendukung Iklim Investasi Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 46, no 2, (April 2017), DOI: 10.14710/mmh.46.2.2017.182-189
- Safitra, Dhian, Adhetya, “Implementasi E-Tax Invoice: Sebuah Studi Komparatif”, *Jurnal Pajak Indonesia* 2, no 1, (2018), <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.508>
- Samuel, Geral, “Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Mmepayar Pajak Masyarakat Indonesia”, *Risalah Hukum* 18, no 1 (Juni 2022), <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.650>
- Santosa, Djoko, Rusdianto Sesung, “Reformasi Hukum Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Perspektif* 26, no 2 (Mei 2021), <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i2.787>
- Sastri Ida I Dewa A Manik, Luh Kade Datrini, “Upaya Peningkatan Pajak Pasca Tax Amnesty Pada Kanwil DJP Bali”, *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 2, no 1, (Maret 2018), <https://doi.org/10.22225/wicaksana.2.1.2018.8-16>
- Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, *Administrative Law & Governance Journal* 2, no 3, (Agustus 2019), <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Sugita I Made, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Layanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karang Asem”, *Metta Jurnal Ilmu Multi*

Disiplin 2, no 3, (8 Desember 2018),
<https://doi.org/10.37329/metta.v2i3.2103>

Susanto, Sri Nur Hari, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan”, *Administrative Law & Governance Journal* 3, No 3 (September 2020), <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430%20%20-%20%20441>

Ulisah, Sri. Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Resistensi Sosial Perubahan Pembangunan oleh Masyarakat. *Gema Keadilan Edisi Jurnal* 3, no 1, (1 Oktober 2016), <https://doi.org/10.14710/gk.2016.3645>

Waluyo, Joko, “Peranan Pajak untuk Meningkatkan Kemandirian Anggaran”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10, no 2, (Desember 2009), DOI: 10.23917/jep.v10i2.798

Widianto, Rio, “Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai *Single Identity Number* (SIN)”, *Jurnal Transformasi Administrasi* 9, no 1, (2019), View of Application of Identity Numbers as Single Identity Number (SIN)

Yoshanda Agung Andana, “Pendapatan Nasional”. *E-Prints Umsida* (15 April 2020), <http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/6990>

Yulianti, Rahmani Timorita, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah”, *La Riba Jurnal Ekonomi Islam* 2, no 1 (Juli 2008), <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>

Zainudin, Fardan Ma’ruf, Rahadi Nugroho, Hanik Susilawati Muamarah, “Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening”, *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no 1, (Juni 2022), <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>

Budiantoro, Setyo, “Kelembagaan dan Tata Kelola Perpajakan Perlu Perubahan”, *Prakarsa Policy Review* (Januari 2015), <https://repository.theprakarsa.org/media/publications/657-kelembagaan-dan-tata-kelola-perpajakan-p-37e58977.pdf>

D. Internet

Aberth, Wilhelmina Alexandra Valmay Putri, “Proposi Pekerja Informal Indonesia Capai 59,17% di 2024”, diakses pada 5 Desember 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/proporsi-pekerja-informal-indonesia-capai-5917-di-2024-F1N9s>

Alatas, M Baqir Idrus, “Bappenas Soroti Manfaat Besar Penerapan Single Identity Number”, diakses pada 14 Februari 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4632989/bappenas-soroti-manfaat-besar-penerapan-sistem-single-identity-number>

Annisa, “Pengertian Good Governance, Ciri dan Prinsipnya”, diakses pada 4 Desember 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/>

Annisa, “Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif”, diakses pada 13 Desember 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-politik-luar-negeri-bebas-aktif/>

Annisa, “Unsur-unsur Terbentuknya Suatu Negara”, diakses pada 5 Desember 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/unsur-unsur-terbentuknya-suatu-negara/>

Antara News, “Kenali Layanan Unggulan Perpajakan bagi Anda”, diakses pada 20 Februari 2025

Artikel Pajakku.com, “Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia”, diakses pada 3 Desember 2024, <https://www.pajakku.com/read/610123808f25dc113f232896/--wwwpajakkucom-read-610123808f25dc113f232896---wwwpajakkucom-read-610123808f25dc113f232896---wwwpajakkucom-read-610123808f25dc113f232896---wwwpajakkucom-read-610123808f25dc113f232896-Asas-Pemungutan-Pajak-yang-Berlaku-di-Indonesia>

Asmarani, Nora Galuh Candra, “Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?”, diakses pada 21 Januari 2025,

<https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/43795/apa-itu-big-data-dan-big-data-analytic>

Assidiq, Maghastria, “Big Data Analytics Sistem Perpajakan Indonesia”, diakses pada 14 Februari 2025, <https://www.pajak.com/pajak/big-data-analytics-sistem-perpajakan-indonesia/>

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, “Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan, Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal”, diakses pada 18 November 2024, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/326>”

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. “Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal”, diakses pada 3 November 2024, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/326>

Badan Kebijakan Fiskal, “Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi”, diakses pada 13 Desember 2024, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/profil/visi-misi-tugas-fungsi>

Badan Pusat Statistik , “Anggaran Pendapatan Negara (Miliar Rupiah), 2007-2017”, diakses pada 18 Januari 2025

Badan Pusat Statistika, “Realisasi Pendapatan Negara tahun 2021 hingga 2024”, diakses (21 Agustus 2024), <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>

BPHTB.ONLINE, “Fungsi Pajak Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara”, diakses pada 29 Oktober 2024, <http://bphtb.asahankab.go.id:8182/post/fungsi-pajak-bagi-pembangunan-bangsa-dan-negara>

Budi, Johan, “Asas Pemungutan Pajak di Indonesia”, diakses pada 3 Desember 2024, <https://www.sobatpajak.com/article/62bc00111f70cd0421952805/Asas>

Cahyasari, Windah Ferry, “Empat Belas Juli, Awal Sejarah Reformasi Perpajakan”, diakses pada 20 Januari 2025,

<https://www.pajak.go.id/artikel/empat-belas-juli-awal-sejarah-reformasi-perpajakan>

Damayanti, Dewi, “UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak”, diakses pada 5 Desember 2024, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak>

DDTC NEWS, “Saatnya Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Sektor Informal”, diakses pada 5 desember 2024, <https://news.ddtc.co.id/komunitas/lomba/1805446/saatnya-mengoptimalkan-penerimaan-pajak-sektor-informal>

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, “Pentingnya Administrasi Kependudukan”, diakses pada 13 Februari 2025, https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/97_pentingnya-administrasi-kependudukan#:~:text=Melalui%20adminduk%2C%20pemerintah%20dapat%20mencatat,data%20yang%20tercatat%20dalam%20adminduk.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, “Compliance Risk Management Tunjang Pengambilan Keputusan DJP”, diakses pada 30 Januari 2025, <https://pajak.go.id/sites/default/files/2020-11/newsletter%205%202019.pdf>

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, “Ditjen Pajak Uji Coba Mobile Tax Unit”, diakses pada 21 Januari 2025, <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/d7/Siaran%20Pers%20MTU%20Ketapang.pdf>

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, “Perjalanan 18 Tahun Digitalisasi Pajak”, diakses pada 20 Januari 2025, <https://www.pajak.go.id/id/berita/perjalanan-18-tahun-digitalisasi-pajak>

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, “Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan DJP”, diakses pada 1 November 2024, <https://www.pajak.go.id/id/visi-misi-tujuan-dan-maklumat-pelayanan>

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, “Pengelolaan Kas Negara”, diakses pada 5 Desember 2024, <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kantor-pusat/pengelolaan-kas-negara/157-layanan/siklus-apbn.html>

Disdukcapil Kabupaten Buleleng, “NIK Dalam KTP-el Sebagai Single Identity Number”, diakses pada 21 Januari 2025, <https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/nik-dalam-ktp-el-sebagai-single-identity-number-94>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, “Apa Saja Sumber Pendapatan Indonesia”, diakses pada 1 November 2024, <https://manajemen.uma.ac.id/2021/11/apa-saja-sumber-pendapatan-negara-indonesia/>

Fatyya Nony, “Ketahui Inilah Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara”, diakses pada 28 November 2024, <https://www.jstax.co.id/jenis-penerimaan-negara>

Fitriya, “NPWP 16 Digit dan Sanksi jika Tidak Padankan NIK-NPWP”, diakses pada 23 Oktober 2024, <https://klikpajak.id/blog/nik-ktp-jadi-npwp/>

Hanggoro, Hendaru Tri, “Mengurai Sejarah APBN Indonesia”, diakses pada 30 November 2024, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/mengurai-sejarah-apbn-indonesia>

Haryo Limanseto, “Menko Airlangga: Membayar dan Melaporkan Pajak Merupakan Bentuk Kecintaan Kepada Negara”. diakses pada 16 Oktober 2024, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3901/menko-airlangga-membayar-dan-melaporkan-pajak-merupakan-bentuk-kecintaan-kepada-negara>

Imany, Daffa Aulia, “Dilema Pajak: Membantu atau Membebani Masyarakat?”, diakses pada 14 Desember 2024, <https://vokasi.unair.ac.id/dilema-pajak-membantu-atau-membebanimasyarakat/>

Imawan, Riswanda Wahyu, “Good Corporate Governance Sebagai Pilar Pembangun Kepatuhan”, diakses pada 4 Desember 2024, Good Corporate Governance Sebagai Pilar Pembangun Kepatuhan | Direktorat Jenderal Pajak

Kontan.co.id, “Defisit APBN Makin Melebar, Ekonom Ungkap Alasannya”, diakses pada 5 Desember 2024, <https://nasional.kontan.co.id/news/defisit-apbn-makin-melebar-ekonom-ungkap-penyebanya>

Kurniati, Dian, “BPK: Approweb Belum Optimal Dukung Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak”, diakses pada 21 Januari 2025, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1798998/bpk-approweb-belum-optimal-dukung-pengawasan-kepatuhan-wajib-pajak>

Majalah Media Keuangan, “Berbenah Perkuat Penerimaan”, diakses pada 20 Januari 2025, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/document/download/mk-edisi-juli-kedua-2021>

Maksum Rangkuti, “Fungsi Pajak yang Wajib Kalian Ketahui”, <https://feb.umsu.ac.id/fungsi-pajak-yang-wajib-kalian-ketahui/#:~:text=Salah%20satu%20fungsi%20pajak%20adalah,pertahan%2C%20dan%20pelayanan%20publik%20lainnya>, diakses pada 20 November 2024

Manurung Josua Tommy Parningotan, “Penuhi Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi”, diakses pada 29 Oktober 2024, <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/penuhi-kewajiban-perpajakan-instansi-pemerintah-dalam-menjaga-stabilitas-ekonomi#:~:text=APBN%20memiliki%205%20Pos%20penting,penting%20dalam%20menjaga%20stabilitas%20ekonomi>.

Mardlo, Zidni Amaliah, “e-filing dan e-form, Apa Bedanya?”, Pajak.go.id (26 Februari 2020) diakses pada 20 Januari 2025

Merriam-Webster.com, Diakses pada 25 Oktober 2024, <https://www.merriam-webster.com/>

- Nugraha, Jaka Galih, “Memudahkan Hidup dengan NPWP”, diakses pada 13 Februari 2025, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/memudahkan-hidup-dengan-npwp>
- Nuraga, I Gusti Made Dwi Satya, “Pentingnya Manusia sebagai Mahluk Sosial dalam Membayar Pajak”, diakses pada 12 Februari 2025, <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/pentingnya-manusia-sebagai-mahluk-sosial-dalam-membayar-pajak>
- Prayogi, Cecizia Almira, “Kenalan dengan ‘Single Identification Number’ Lewat Pemadanan NIK Jadi NPWP”, diakses pada 21 Januari 2025, <https://www.pajak.com/pajak/kenalan-dengan-single-identification-number-lewat-pemadanan-nik-jadi-npwp/>
- Prihatin, “Mengenal Apa Itu Sumber Kewenangan Berupa Mandat”, diakses pada 5 Februari 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca-artikel/14283/Mengenal-Apa-Itu-Sumber-Kewenangan-Berupa-Mandat.html>
- Radythia Alpha Akbar. 5 (Lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara, diakses pada 1 Desember 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>
- Rangkuta, Maksum, “Kebijakan Moneter dan Fiskal: Mengupas Pengertian, Tujuan, Jenis, Perbedaan, dan Contohnya di Indonesia”, diakses pada 10 November 2024, <https://umsu.ac.id/artikel/kebijakan-moneter-dan-fiskal-mengupas-pengertian-tujuan-jenis-perbedaan-dan-contohnya-di-indonesia/>
- Rani Maulida, “Mengenal Self-assessment dalam Sistem Perpajakan di Indonesia”, diakses pada 16 November 2025, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/self-assessment-system-pajak>
- Saptati, Reni, “PSIAP untuk Layanan Pajak Lebih Mantap”, diakses pada 14 Desember 2024, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/psiap-untuk-layanan-pajak-lebih-mantap>

Sapto Andika Candra, “Reformasi Pajak 1983, RI Ingin Lepas dari Ketergantungan Sektor Migas”, diakses pada 18 November 2024, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/326>

Saputra, Wisnu Saka, “Reformasi Perpajakan: Lima Pilar Satu Tujuan”, diakses pada 19 Januari 2025, <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/reformasi-perpajakan-lima-pilar-satu-tujuan>

Sekretariat Kabupaten Tegal, “Warisan Leluhur Bangsa Indonesia adalah Gotong Royong”, diakses pada 18 November 2024, <http://setda.tegalkab.go.id/2019/08/17/warisan-leluhur-bangsa-indonesia-adalah-gotong-royong/>

Shidarta, “Perbedaan Karakteristik Asas dengan Norma/Peraturan Hukum”, diakses pada 12 Februari 2025, <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/15/perbedaan-karakteristik-asas-dan-norma/>

Sriyanto, Hari. “Kewajiban Warga Negara Membayar Pajak”. diakses pada 16 Oktober 2024, <https://binus.ac.id/character-building/2021/03/kewajiban-warga-negara-membayar-pajak/>

Sukari. “Pemimpin itu Melindungi, Mencerdaskan, dan Menyejahterakan, diakses pada 11 Oktober 2024, <https://unnes.ac.id/pemimpin-harus-melindungi-mencerdaskan-dan-mensejahterakan/>

Widoyoko, “Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan”, Dukcapil Balikpapan, diakses pada 15 Desember 2024, <https://capil.balikpapan.go.id/disdukcapil/indexartikel/5/detail#:~:text=Manfaat%20Dokumen%20Kependudukan%20:,hukum%20dan%20k%20nyamanan%20bagi%20pemiliknya>